BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT.Pos Indonesia merupakaan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman surat dan telegraf yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Belanda.kantor Pos pertama di Indonesia adalah di Batavia yang didirikan oleh gubernur jendral GW.baron pada tanggal 26 Agustus 1746.kemudian pada tahun 1864 dinas pos sebagai jabatan,berada dibawah pengawasan direkteur producten en civile magazijen.tahun 1875 dinas pos disatukan dengan dinas telegraf dan disebut '*post en telegrafdiens*t'. Sejak tahun 1884 jawatan telepon disatukan sehingga mulai tahun 1906 disebut dengan "*post telegraf en telefondienst*" (PTT).

PT.pos Indonesia bermula mempunyai sebutan nama yaitu jawatan PTT Republik Indonesia ,yang berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilan alihan kantor pusat PTT di bandung oleh angkatan muda PTT (AMPTT) dari pemerintah tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggat sejarah berdirinya jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai hari bakti PTT dan yang kemudian menjadi dari Bakti Parpostel.

Lalu jawatan PTT mengalami perubahan status menjadi perusahaan Negara pos da telemunikasi (PN Postel) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.240 tahun 1961, supaya memperoleh suatu usaha. Kemudian pada tahun 1965 perusahaan Negara pos dan telemunikasi (PN Postel) telah dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda yaitu perusahaan Negara pos dan giro (PN Pos dan Giro) dan perusahaan Negara telemunikasi berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.29 tahun 1965 dan peraturan pemerintah (PP) No.30 tahun 1965.

Peraturan Negara Pos Dan Giro merupakan perusahaan badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dalam laporan penyelenggaraan Pos Dan Giro yang berkantor pusat Di Bandung. Tujuan pendirian perusahaan Negara pos dan giro adalah untuk turut serta mebangun ekonomi nasional dangan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kerja dalam perusahaan ,menuju masyarakat adil dan makmur materi dan spiritual.

Pada tahun 1978 status perusahaan Negara Pos Dan Giro telah diubah menjadi perusahaan umum Pos Dan Giro (Perum Pos Dan Giro) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1978. Ini berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim usaha,maka status sebagai perusahaan umum umum (perum) telah disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.24 tahun 1984.

PT.Pos Indonesia telah menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan dengan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih

fleksibel dan dinamis supaya mampu mengembangkan pelayanan jasa yang lebih baik.

Kemudian pada tahun 1955 PT.Pos Indonesia telah mengalami perubahan status dari yang semula sebagai perusahaan umum (perum) pos dan giro berubah menjadi PT.Pos Indonesia (persero) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.5 tahun 1995 pada tanggal 5 juni 1995.

- **Visi Dan Misi Perusahaan**

PT.Pos Indonesia mempunyai visi dan misi diantaranya yaitu :

PT.Pos Indonesia senantiasa berupa untuk menjadi penyedia saran komunikasi kelas dunia,yang peduli terhadap lingkungan,dikelola oleh sumber daya manusia yang professional,sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

PT.Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, logistic dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaringan bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan kolaboratif.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakaan wadah berkumpulnya orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab jelas. Suatu

tanggung jawab timbul sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ketingkat manajemen yang lebih rendah .

Dengan demikian, wewenang mengalir dari atas kebawah,sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya. Kantor Pos Besar Bandung, secara struktural terdiri dari kepala kantor serta dibantu oleh Wakilnya yang membawahi

1. Manajer Audit
2. Manajer Keuangan
3. Manajer Pemasaran
4. Manajer Admistrasi
5. Manajer Pengolahan Pos (PURI)
6. Manajer Pelayanan I/II
7. Ka. Unit Usaha Devisi Filateli
8. Fungsional PUKK
9. Manajer Unit Pelayanan Luar
10. Manajer Sarana
11. Manajer Akutansi
12. Manajer SDM
13. Manajer Pengolahan Pos I/II
14. Ka. Unit Usaha Devisi Paket Pos
15. Ka. Unit Usaha Devisi TSI

Bila kita lihat struktur organisasi yang dimiliki oleh PT.Pos Indonesia merupakaan gabungan dari jenis organisasi dalam bentuk Lini dan Staff . dimana wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada bagian yang memimpin satuan-satuan organisasi menurut jenjang organisasi.

4.1.3 Uraian Tugas Komite Audit di PT Pos Indonesia Bandung (Persero)

Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pengelola aktivitas pemeriksaan perusahaan diuraikan menjadi 6 (enam) aktivitas sebagai berikut :

1. Merencanakan Program SPI.

   Mengelolala kegiatan penyusunan perencanaan program SPI baik jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Penyusunan rencana pemeriksaan didasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Sebagai bahan masukkan penyusunan diambil dari Laporan Internal dan Eksternal, data *monitoring* dan permintaanaudit dari manajemen. Penyusunan rencana non-pemeriksaan meliputi aktivitas pemberian jasa konsultasi, penilaian dan pengembangan aktivitas audit, *training*, *partnership* dan lain-lain.

2. Melaksanakan Program Audit

   Mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan pemeriksaan dengan tujuan mengumpulkan informasi umum dan bukti pemeriksaan sebagai dasar pembuatan program pemeriksaan pendahuluan seperti dasar hokum, sejarah usaha, organisasi, daftar aktiva, prosedur kegiatan dan tinjauan fisik.

b. Tahap pemeriksaan pendahuluan dengan tujuan memperoleh identifikasi mengenai aspek pengendaluian manajemen yang lemah sebagai dasar penyusunan program pemeriksaan lanjutan.

c. Tahap pemeriksaan lanjutan merupakan pemriksaan secara rinci yang merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan.

3. Melaporkan Hasil Audit

Mengelola kegiatan penyusunan hingga pendistribusian laporan yang diantaranya, meliputi :

a. Konfimrasi temuan pemeriksaan dengan pihak *auditee* yang menghasilkan daftar temuan rinci.

b. Penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

c. Penyusunan akhir atas draft LHP pimpinan tertinggi *auditee*.

d. Pembuatan LHP dan menyampaikannyakepada direktur utama dan pihak yang terkait lainnya.

2. Memonitor dan memeriksa tindak lanjut temuan/rekomendasi mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan tindak lanjut, yaitu :

a. Membuat daftar *monitoring* yang dihasilkan dari aktivitas auditee.

b. Memeriksa tindak lanjut atas temuan/rekomendasi yang telah disampaikan oleh LHP.

c. Merekomendasikan temuan *monitoring* sebagai fungsi *Daily Operatian Control*.

3. Mengevaluasi Kinerja Auditor

Mengelola kegiatan pelaksanaan, memonitor dan menilai efektivitas program jaminan dan peningkatan kualitas audit yang meliputi tahapan:

a. Mengumpulkan dan menganalisa LHP dan bukti pemeriksaan.

b. Membuat kuesioner yang akan diisi oleh manjemen/*auditee*.

c. Menganalisa isi kuesioner.

d. Membuat penilaian kinerja auditor.

6. Mengembangkan Metode Audit

Mengelola kegiatan pelaksanaan pengembangan pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dokumen audit dan hasil observasi kegiatan pemeriksaan baik berupa hasil evaluasi kinerja auditor maupun riwayat atau permasalahan yang dihadapi pemeriksa.

b. Membuat konsep/model pemriksaan sehingga melahirkan berbagai alternatif konsep/model dengan menggunakan teori/teknik audit modern.

c. Pengujian konsep/model pemeriksaan bersam-sama dengan pemeriksa.

d. Membuat kebijakan audit seperti : kebijakan pemriksaan, strategi pemriksaan, prosedur pemeriksaan, teknik dan metode pemeriksaan.

4.1.4 Aktivitas Perusahaan

Pelaksanan jasa pada kantor Pos Besar Bandung Di Pt Pos Indonesia (persero).

Berdasarkan undang-undang No:6 tahun 1984 tetang pos antara lain menyatakana bawha pos diselenggarakan guna menunjang pembangunan serta memperkuat persatuan,kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan Negara dengan memberikan pelayanan yang baik mungkin keseluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.

Hubungan dengan jasa, maka kantor pos besar bandung di PT.Pos Indonesia (Persero) telah menyediakan beberapa jenis pelayanan jasa, diantaranya yaitu:

1. Pelayanan jasa dalam bidang pengiriman surat terdiri dari :
    a. Surat pos

        Layanan standar pengiriman berita yang tersedia disemua kantor pos dengan tarif seragam,baik untuk perhubungan didalam maupun luar negri, klasifikasi kiriman jenis surat pos adalah:Surat,Kartu pos,Warkat,Barang cetakan ,Majalah sekogram Bungkusan,Wesel pos tembusan,Wesel luar nengri kea tau dari beberapa Negara.

b. Giro Pos

layanan keungan untuk menumpang penyimpanan dan berbagai transaksi,baik untuk pemgang rekening dan perorangan maupaun perusahaan atau keperluan bisnis diseluruh Indonesia.

2. Pelayanan jasa dalam bidang pengiriman barang terdiri dari :

a.Paket Pos

Layanan untuk mengirim barang yang dapat dilakukan disemua kantor pos baik untuk perhubungan domestic maupun internasional. Klasifikasi paket pos dapat dibedakan dari cara pengkutannya,yaitu :

- Paket pos darat atau laut untuk perhubungan darat atau laut,dengan berat maksimum 40kg.
- Paket pos udara untuk perhubungan udara,dengan berat mkasimum 30kg.

3. pelayanan jasa dalam bidang keagenan terdiri:

a. Pembayaran pension untuk PNS dan ABRI.

b. Penjualan Materi.

c. Perbanas.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 15 responden. Untuk variabel X_1, X_2, dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu

Kepala Sub Bagian Auditor Internal. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

1) Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	22	62,85%
Perempuan	13	37,15%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22 orang atau sebesar 62,85% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 13 orang atau sebesar 37,15%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Kepala Sub Bagian Audit Internal lebih banyak responden laki-laki, dan pada kenyataanya Kepala Sub Bagian Audit Internal laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung.

2) Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
31-35 Tahun	0	0%
36-40 Tahun	17	48,57%
>40 Tahun	18	51,43%
Jumlah	35	100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 36 - 40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 48,57%dan >40 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 51,43%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia >40 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Kepala Sub Bagian Audit Internal lebih banyak berumur >40 tahun. Selain itu rata-rata usia Kepala Sub Bagian Audit Internal pada PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung.

3) Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma III	0	0%
Strata I (S1)	25	71,42%
Strata II (S2)	10	28,58%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 25 orang atau sebesar 71,42% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 10 orang atau sebesar 28,58%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Kepala Sub Bagian Audit Internal pada PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung rata-rata lulusan Strata I (S1).

4) Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1– 3 Tahun	0	0%
3 – 5 Tahun	12	34.28%
>5 Tahun	23	65,72%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama 3 - 5 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 34.28%, dan responden dengan lama kerja >5 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 65,72% Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak >5 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Kepala Sub Bagian Audit Internal pada PT.Pos Indonesia (Persero) Jl.Asia Afrika No:49 Bandung lebih banyak berumur >40 tahun. Selain itu rata-rata usia Kepala Sub Bagian Audit Internal pada PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung rata-rata telah bekerja antara >5 tahun.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Analisis Kualitatif

4.2.1.1 Peran Komite Audit

Peran Komite Audit akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Peran Komite Audit diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 11 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

4.2.1.1.1 Penelaahaan Terhadap Program Kerja Dan Fungsi Audit Internal

Tabel 4.5
Penelaahaan Terhadap Program Kerja Audit Internal Pt.Pos Indonesia (Persero) Bandung

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Sangat Penting	5	15	42,86%	75	
Penting	4	15	42,86%	60	
Biasa saja	3	4	11,43%	12	85,15%
Tidak penting	2	1	0,286%	2	
Sangat tidak penting	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**149**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa audit internal membutuhkan sangat penting menelaah terhadap program kerja dalam melakukan audit. Hanya sebagian kecil responden yang menelaah terhadap program kerja audit tidak penting

bagi audit internal dalam melakukan audit. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85,15%bila menunjuk ke tabel 4.5 termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya audit internal dalam melakukan audit sangat membutuhkan penelahaan terhadap program kerja.

Tabel 4.6
Penelaahaan Terhadap Fungsi Audit Internal PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	10	28,87%	50	
Sangat Setuju	4	25	71,43%	100	
Netral	3	0	0%	0	85,71%
Tidak Setuju	2	0	0%	0	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		35	**100%**	**150**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa audit internal membutuhkan sangat penting menelaah terhadap fungsi audit audit. Hanya sebagian kecil responden yang menelaah terhadap fungsi audit tidak penting bagi audit internal dalam melakukan audit. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85,71%%bila merujuk ke tabel 4.6 termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya audit internal dalam melakukan audit sangat membutuhkan penelahaan terhadap program kerja.

Tabel 4.7
Memberikan Persetujuan Atas Penunjukan Dan Pemberhentian Kepada Audit Internal PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	16	45,71%	80	
Sangat Setuju	4	14	40,00%	56	
Netral	3	5	14,29%	15	86,28%
Tidak Setuju	2	0	0%	0	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**151**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa akuntan publik membutuhkan sangat penting Memberikan Persetujuan Atas Penunjukan Dan Pemberhentian Kepada Audit Internal. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Memberikan Persetujuan Atas Penunjukan Dan Pemberhentian Kepada Audit Internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 86,28% bila merujuk ke tabel 4.7 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya akuntan publik dalam melakukan audit sangat membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan profesi akuntan dibidang audit keuangan.

Tabel 4.8
Melakukan review atas charter audit internal

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	19	54,29%	95	
Sangat Setuju	4	7	20,00%	28	
Netral	3	2	05,71%	6	81,71%
Tidak Setuju	2	7	20,00%	14	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**143**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa audit internal membutuhkan review atas charter audit internal dalam melakukan audit. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Melakukan review atas charter audit internal . Persentase skor tanggapan responden sebesar 81,71% bila merujuk ke tabel 4.8 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya auditor internal dalam melakukan audit sangat membutuhkan review atas charter audit internal.

Tabel 4.9

Melakukan review atas rencana audit tahunan

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	18	51,435	90	
Sangat Setuju	4	13	37,14%	52	
Netral	3	4	11,43%	12	88,00%
Tidak Setuju	2	0	0%	0	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**154**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa akuntan publik membutuhkan sangat penting Melakukan review atas rencana audit tahunan. Hanya sebagian kecil responden yang Melakukan review atas rencana audit tahunan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 88,00% bila merujuk ke tabel 4.19 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya audit internal dalam Melakukan review atas rencana audit tahunan

4.2.1.1.2 Membangun Dan Mengendalikan Fungsi Audit Internal

Tabel 4.10
Membantu pembangun dan pengembangan audit internal

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	19	54,29%	95	
Sangat Setuju	4	10	28,57%	40	
Netral	3	5	14,29%	15	86,85%
Tidak Setuju	2	1	2,86%	2	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		35	**100%**	**152**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa akuntan publik membutuhkan sangat penting Membantu pembangun dan pengembangan audit internal . Hanya sebagian kecil responden yang merasa Membantu pembangun dan pengembangan audit internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 86,85% bila merujuk ke tabel 4.10 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada

umumnya komite audit dalam Membantu pembangun dan pengembangan audit internal .

Tabel 4.11
Melakukan review atas semua laporan audit internal

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	15	42,86%	75	
Sangat Setuju	4	13	37,14%	52	
Netral	3	4	11,43%	12	82,85%
Tidak Setuju	2	3	85,7%	6	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**145**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa akuntan publik membutuhkan sangat penting Melakukan review atas semua laporan audit internal. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Melakukan review atas semua laporan audit internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 82,85% bila merujuk ke tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya komite audit dalam Melakukan review atas semua laporan audit internal.

Tabel 4.12
Memonitor kinerja audit internal

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	20	57,14%	100	
Sangat Setuju	4	7	20,00%	28	
Netral	3	8	22,86%	24	86,85%
Tidak Setuju	2	0	0%	0	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		35	**100%**	**152**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa komite membutuhkan sangat penting memperoleh Memonitor kinerja audit internal. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Memonitor kinerja audit internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 86,85% bila merujuk ke tabel 4.12 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya komite audit dalam melakukan audit sangat membutuhkan Memonitor kinerja audit internal.

Tabel 4.13
Memastikan bahwa fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap setandar professional yang berlaku

Jawaban	**Bobot**	**frek.**	%	**ΣροκΣ**	**% Skor**
Setuju	5	5	14,29%	25	
Sangat Setuju	4	16	45,71%	64	
Netral	3	12	34,29%	36	73,71%
Tidak Setuju	2	2	5,71%	4	
Sangat tidak Setuju	1	0	0%	0	
Jumlah		**35**	**100%**	**129**	

Paling banyak responden berpendapat bahwa komite membutuhkan sangat penting Memastikan bahwa fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap setandar professional yang berlaku. Hanya sebagian kecil responden yang Memastikan bahwa fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap setandar professional yang berlaku. Persentase skor tanggapan responden sebesar 73,71% bila merujuk ke tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya komite audit dalam Memastikan bahwa fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap setandar professional yang berlaku.

4.2.1.1.3 Melakukan Investigasi

Tabel 4.14
Membantu dalam investigasi semua aktifvitas perusahaan baik aktifvitas oprasional maupun administrasi

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	20	57.14%	100	
sangat setuju	4	12	34.29%	48	
netral	3	2	5.71%	6	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	156	89,14%

Paling banyak responden berpendapat bahwa komite audit membutuhkan sangat penting Membantu dalam investigasi semua aktifvitas perusahaan baik aktifvitas oprasional maupun administrasi . Hanya sebagian kecil responden yang merasa Membantu dalam investigasi semua aktifvitas perusahaan baik aktifvitas oprasional maupun administrasi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 89,14% bila merujuk ke tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya komite audit dalam Membantu dalam investigasi semua aktifvitas perusahaan baik aktifvitas oprasional maupun administrasi .

Tabel 4.15
Konsep dan prosudur mambawa dampak bagi perusahaan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	19	54.29%	95	
sangat setuju	4	14	40.00%	56	
netral	3	2	5.71%	6	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	157	89.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa komite audit membutuhkan sangat penting memperoleh Konsep dan prosudur mambawa dampak bagi perusahaan . Hanya sebagian kecil responden yang merasa Konsep dan prosudur mambawa dampak bagi perusahaan . Persentase skor tanggapan responden sebesar 89.71% bila merujuk ke tabel 4.15 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya komite audit dalam memperoleh Konsep dan prosudur mambawa dampak bagi perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada sebelas butir pernyataan diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Peran Komite Audit di PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Tentang Peran Komite Audit Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

No	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor**	**Kriteria**
1	Penelaahan Terhadap Program Kerja Dan Fungsi Audit Internal	593	875	85,37%	Sangat Baik
2	Membangun dan mengendalikan fungsi audit internal	678	700	82,56%	Baik
3	Melakukan investigasi	313	350	89,42%	Sangat Tinggi
	PERAN KOMITE AUDIT	**1584**	**1925**	**85,78%**	**Sangat Tinggi**

Berdasarkan Rekapitulasi persentase skor tanggapan responden dapat dilihat secara keseluruhan peran komite audit Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat tinggi. Pada umumnya peran komite audit yang ada Pada PT Pos Indonesia (Persero) Jl.Asia Afrika No.49 Bandung sudah memiliki penalaahan terhadap progam kerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugas, juga melakukan investigasi yang sangat tinggi dalam melaksanakan tugas. Sementara peran komite audit Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat tinggi.

4.2.1.2 Kinerja Audit Internal

Kinerja Audit Internal akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kinerja Audit Internal diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 11 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

4.2.1.2.1 *Independence*

Tabel 4.17
Auditor Internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan keseungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	1	2.86%	5	
sangat setuju	4	12	34.29%	48	
netral	3	19	54.29%	57	
Tidak setuju	2	3	8.57%	6	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	116	85,54%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan keseungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Hanya sebagian kecil responden yang Auditor Internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan keseungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Persentase skor

tanggapan responden sebesar 85,54% bila merujuk ke tabel 4.17 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Auditor Internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan keseungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.

Tabel 4.18
Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Audit Internal atau mendiskreditkan organisasinya

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	2	5.71%	10	
sangat setuju	4	11	31.43%	44	
netral	3	18	51.43%	54	
Tidak setuju	2	4	11.43%	8	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	116	66.29%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Audit Internal atau mendiskreditkan organisasinya. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Audit Internal atau mendiskreditkan organisasinya.. Persentase skor tanggapan responden sebesar 66.29% bila merujuk ke tabel 4.18 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada

umumnya Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Audit Internal atau mendiskreditkan organisasinya.

4.2.1.2.2 Kemampuan Profesional

Tabel 4.19
Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menmbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	2	5.71%	10	
sangat setuju	4	11	31.43%	44	
netral	3	21	60.00%	63	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	119	68.00%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menmbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat

menmbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Persentase skor tanggapan responden sebesar 68.00% bila merujuk ke tabel 4.19 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menmbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

Tabel 4.20
Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Audit Internal atau mendiskreditkan organisasinya

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	2	5.71%	10	
sangat setuju	4	13	37.14%	52	
netral	3	20	57.14%	60	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	122	69.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi perimbangan profesionalnya.. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Auditor Internal tidak

boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi perimbangan profesionalnya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 69.71%bila merujuk ke tabel 4.20 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada Auditor Internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi perimbangan profesionalnya.

4.2.1.2.3Lingkungan Pekerjaan

Tabel 4.21
Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	1	2.86%	5	
sangat setuju	4	11	31.43%	44	
netral	3	22	62.86%	66	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	97%	115	65.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya.. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya.. Persentase skor tanggapan responden

sebesar 65.71%bila merujuk ke tabel 4.21 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya.

Tabel 4.22
Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
Setuju	5	4	11.43%	20	
Sangat setuju	4	11	31.43%	44	
Netral	3	19	54.29%	57	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	123	70.29%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 70.29% bila merujuk ke tabel 4.22 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.

Tabel 4.23
Sangat tidak setuju, karena Auditor Internal selalu harus mengusahakan berbagai upaya. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan. Yang konsisten pengendalian internal

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	0	0.00%	0	
Sangat setuju	4	13	37.14%	52	
netral	3	18	51.43%	54	
Tidak setuju	2	4	11.43%	8	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	65.14 %
Jumlah		35	100%	114	

Paling banyak responden berpendapat bahwa Sangat tidak setuju, karena Auditor Internal selalu harus mengusahakan berbagai upaya. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan. Yang konsisten pengendalian internal. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Sangat tidak setuju, karena Auditor Internal selalu harus mengusahakan berbagai upaya. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan. Yang konsisten pengendalian internal. Persentase skor tanggapan responden sebesar 65.14% bila merujuk ke tabel 4.23 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Sangat tidak setuju, karena Auditor Internal selalu harus mengusahakan berbagai upaya. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan. Yang konsisten pengendalian internal.

4.2.1.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Tabel 4.24
Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta pernting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang tidak diungkapkan dapat mendistorsi kinerja kegiatan direview atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	0	0.00%	0	
sangat setuju	4	13	37.14%	52	
netral	3	13	37.14%	39	
Tidak setuju	2	9	25.71%	18	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	109	62.29%%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta pernting yang diketahuinya. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta pernting yang diketahuinya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 62.29%% bila merujuk ke tabel 4.24 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta pernting yang diketahuinya.

Tabel 4.25
Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	0	0.00%	0	
sangat setuju	4	14	40.00%	56	
netral	3	18	51.43%	54	
Tidak setuju	2	3	8.57%	6	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	116	66.29%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 66.29%bila merujuk ke tabel 4.25 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Tentang Peran kinerja audit internal Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung

No	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor**	**Kriteria**
1	Independensi	232	350	66,29%	Cukup Baik
2	Kemampuan profesional	241	350	65,85%	Cukup Baik
3	Lingkup pekerjaan	352	525	67,04%	Cukup Baik
4	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan	225	350	64,29	Cukup Baik
	KINERJA AUDIT INTERNAL	**1050**	**1575**	**49,79**	**Kurang Baik**

Berdasarkan Rekapitulasi persentase skor tanggapan responden dapat dilihat secara keseluruhan peran komite audit Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat tinggi. Pada umumnya kinerja audit internal yang ada Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah memiliki kemampuan professional yang cukup baik dalam melaksanakan tugas, juga memiliki lingkup perkerjaan yang cukup baiki dalam melaksanakan tugas. Sementara yang diikuti kinerja audit internal Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah cukup baik.

4.2.1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan *Good Coperate Governance*

4.2.1.3.1 *Transparency* (Keterbukaan)

Tabel 4.27
Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya

jawaban	Bobot	Frek.	%	ΣκορΣ	% Skor
setuju	5	13	37.14%	65	
Sangat setuju	4	14	40.00%	56	
netral	3	5	14.29%	15	
Tidak setuju	2	2	5.71%	4	
sangat tidak setuju	1	1	2.86%	1	
Jumlah		35	100%	141	85,54%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Hanya sebagian kecil responden yang merasa pendidikan profesi Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85,54% bila merujuk ke tabel 4.27 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Tabel 4.28
Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara professional di komunikasikan kepada pemangku kepentingan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	13	37.14%	65	
sangat setuju	4	18	51.43%	72	
netral	3	4	11.43%	12	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	149	85.14%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara professional di komunikasikan kepada pemangku kepentingan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85.14% bila merujuk ke table 4.28 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara professional di komunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Tabel 4.29
Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasian sesuai dengan perundang-undangan dan hak pribadi

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	9	25.71%	45	
sangat setuju	4	23	65.71%	92	
netral	3	2	5.71%	6	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	145	82.86%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasian sesuai dengan perundang-undangan dan hak pribadi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 82.86% bila merujuk ke tabel 4.29 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasian sesuai dengan perundang-undangan dan hak pribadi.

4.2.1.3.2 *Accountability* (Akuntabilitas)

Tabel 4.30
Perusahaan harus menyakini semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kopentensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranan dalam pelaksaan GCG

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	16	45.71%	80	
sangat setuju	4	16	45.71%	64	
netral	3	3	8.57%	9	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	103%	155	88.57%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan harus menyakini semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kopentensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranan dalam pelaksaan GCG. Persentase skor tanggapan responden sebesar 88.57% bila merujuk ke tabel 4.30 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan harus menyakini semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kopentensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranan dalam pelaksaan GCG.

Tabel 4.31
Perusahaan tidak memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengolahan perusahaan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	0	0.00%	0	
sangat setuju	4	6	17.14%	24	
netral	3	19	54.29%	57	
Tidak setuju	2	10	28.57%	20	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	101	57.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan tidak memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengolahan perusahaan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa pendidikan profesi akuntan dibidang audit keuangan tidak penting bagi akuntan publik dalam melakukan audit. Persentase skor tanggapan responden sebesar 57.71%bila merujuk ke tabel 4.31 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan tidak memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengolahan perusahaan.

4.2.1.3.3 *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Tabel 4.32
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus selalu dilakukan oleh setiap organ perusahaan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	11	31.43%	55	
sangat setuju	4	19	54.29%	76	
netral	3	4	11.43%	12	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	145	82.86%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus selalu dilakukan oleh setiap organ perusahaan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 82.86%bila merujuk ke tabel 4.32 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus selalu dilakukan oleh setiap organ perusahaan.

Tabel 4.33
Perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban social terhadap masyarakat

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	14	40.00%	70	
sangat setuju	4	16	45.71%	64	
netral	3	5	14.29%	15	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	149	85.14%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban social terhadap masyarakat. Hanya sebagian kecil responden yang merasa pendidikan profesi akuntan dibidang audit keuangan tidak penting bagi Perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban social terhadap masyarakat. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85.14%bila merujuk ke tabel 4.33 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban social terhadap masyarakat.

Tabel 4.34
Perusahaan tidak melindung pemegang saham dan *stakeholders*

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	12	34.29%	60	
sangat setuju	4	18	51.43%	72	
netral	3	4	11.43%	12	
Tidak setuju	2	1	2.86%	2	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	146	83.43%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan tidak melindung pemegang saham dan *stakeholders*. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Perusahaan tidak melindung pemegang saham dan *stakeholders*. Persentase skor tanggapan responden sebesar 83.43% bila merujuk ke tabel 4.34 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan tidak melindung pemegang saham dan *stakeholders*

4.2.1.3.4 Independency (Kemandirian)

Tabel 4.35
Perusahaan telah dikelola secara professional

jawaban	Bobot	Frek.	%	ΣκορΣ	% Skor
setuju	5	13	37.14%	65	
sangat setuju	4	19	54.29%	76	
netral	3	3	8.57%	9	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	150	85.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan telah dikelola secara professional. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Perusahaan telah dikelola secara professional. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85.71%bila merujuk ke tabel 4.35 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan telah dikelola secara professional.

Tabel 4.36
Dalam pengolahan perusahaan terdapat benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak tertentu

jawaban	Bobot	Frek.	%	ΣκορΣ	% Skor
setuju	5	0	0.00%	0	
sangat setuju	4	5	14.29%	20	
netral	3	21	60.00%	63	
Tidak setuju	2	9	25.71%	18	
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	101	57.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Dalam pengolahan perusahaan terdapat benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak tertentu. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Dalam pengolahan perusahaan terdapat benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak tertentu. Persentase skor tanggapan responden sebesar 57.71%bila merujuk ke tabel 4.36 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Dalam pengolahan perusahaan terdapat benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak tertentu.

Tabel 4.37
Masing-masing organ perusahaan melaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	16	45.71%	80	
sangat setuju	4	16	45.71%	64	
netral	3	3	8.57%	9	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	153	87.43%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Masing-masing organ perusahaan melaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Masing-masing organ perusahaan melaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 87.43%bila merujuk ke tabel 4.37 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Masing-masing organ perusahaan

melaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

4.2.1.3.5 Kewajaran

Tabel 4.38
Perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapatan bagi kepentingan perusahaan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	13	37.14%	65	
sangat setuju	4	19	54.29%	76	
netral	3	3	8.57%	9	
Tidak setuju	2	0	0.00%	0	
sangat tidaksetuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	150	85.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapatan bagi kepentingan perusahaan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapatan bagi kepentingan perusahaan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 85.71%bila merujuk ke tabel 4.38 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapatan bagi kepentingan perusahaan.

Tabel 4.39
Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepda pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan

jawaban	Bobot	Frek.	%	**ΣκορΣ**	**% Skor**
setuju	5	0	0.00%	0	
Sangat setuju	4	5	14.29%	20	
netral	3	21	60.00%	63	
Tidak setuju	2	9	25.71%	18	
sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0	
Jumlah		35	100%	101	57.71%

Paling banyak responden berpendapat bahwa Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepda pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Hanya sebagian kecil responden yang merasa Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepda pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 57.71% bila merujuk ke tabel 4.39 termasuk dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa pada umumnya Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepda pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Tabel 4.40
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

No	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor**	**Kriteria**
1	*Transparency* (Keterbukaan)	435	525	82,91%	Baik
2	*Accountability* (Akuntabilitas)	435	350	73.14%	Baik
3	*Responsibility* (Pertanggungjawaban)	256	525	83,81%	Baik
4	*Independency* (Kemandirian)	**440**	**525**	**76,95%**	Baik
5	kewajaran	**404**	**350**	**71,71%**	Baik
	Pelakasanaa Goog Corporate Governance	**1535**	**2275**	**84,92%**	**Sangat** Baik

Berdasarkan Rekapitulasi persentase skor tanggapan responden dapat dilihat secara keseluruhan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat tinggi. Pada umumnya *Pelakasanaa Goog Corporate Governance* yang ada Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah memiliki *Accountability* yang cukup baik dalam melaksanakan tugas, juga memiliki *Independency* yang cukup baik dalam melaksanakan tugas. Kewajaran baru

dalam kategori sesuai dengan pelaksanaan tugas. prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat tinggi.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Pada penelitian ini untuk mengetahui bentuk hubungan linier dari Peran Komite dan Kinerja Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* digunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum menggunakan data yang telah diperoleh dilakukan pengujian normalitas data dan dijelaskan hasil uji asumsi regresi sehingga hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

A. Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel X_1 dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan Peran Komite Audit dan Kinerja Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance*. Dalam perhitungannya penulis menggunakan dua cara yaitu manual dan

komputerisasi. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 15 for windows.*

Model regressi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan).Berdasarkan Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 15 for windows* yaitu bisa dilihat di lampiran. Sedangkan menurut SPSS 15 :

Tabel 4.46
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.373	.467		.799	.430
	X1	.468	.151	.424	3.107	.004
	X2	.415	.136	.417	3.055	.005

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada Tabel 4.46 maka dapat dibentuk model prediksi variabel Peran Komite Audit dan Kinerja Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

$$Y = 0{,}373 + 0{,}468\ X_1 + 0{,}415\ X_2$$

Dimana :

Y = *Good Corporate Governance*

X_1 = Peran Komite Audit

X_2 = Kinerja Audit Internal

Nilai konstanta (a) sebesar 0.373 menunjukkan nilai rata-rata *Good Corporate Governance* pada PT.Pos Indonesia Bandung apabila peran komite audit tidak baik. Kemudian nilai koefisien regresi (b_1) sebesar **0,468** menunjukkan peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT.Pos Indonesia Bandung apabila Peran Komite Audit ditingkatkan sebesar satu satuan. Kemudian nilai koefisien regresi (b_2) sebesar **0,415** menunjukkan peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT.Pos Indonesia Bandung apabila Pengetahuan perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan.

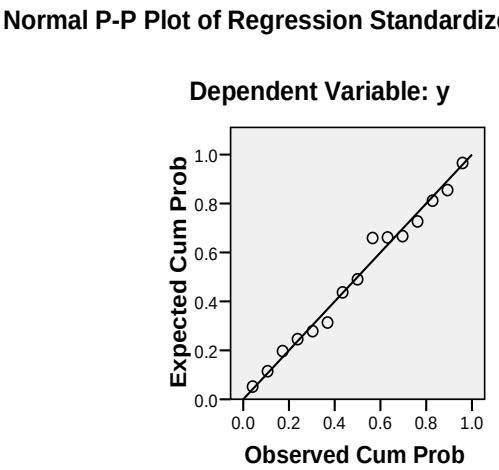
Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regressi dari kedua variabel bertanda positif sedangkan yang artinya menunjukkan bahwa peran komite audit dan kinerja audit internal tidak dapat meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Untuk menguatkan hasil regresi yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), dilakukan pengujian asumsi klasik regresi, dimana hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pengujian Normalitas Data Residual

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.



Gambar 4.2

Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

b. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.43

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error
1	X1	.899	1.112
	X2	.899	1.112

a Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti pada tabel 4.43 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang kuat antara sesama variabel independen, dimana nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.

c. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.44 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.44
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			ABSOLUT_ERROR
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.403*
		Sig. (2-tailed)	.017
		N	35
	X2	Correlation Coefficient	-.048
		Sig. (2-tailed)	.785
		N	35
	ABSOLUT_ERROR	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

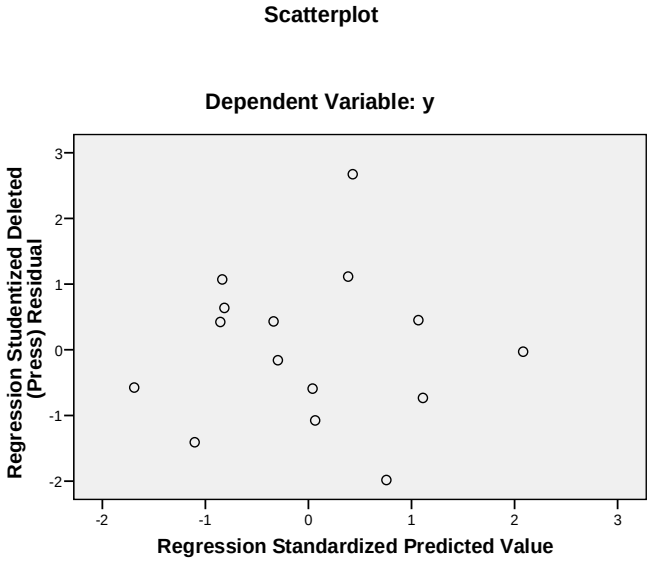
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.44 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi dari masing-masing koefisien regressi kedua variabel independen dengan nilai absolut error masih lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,17 dan 0,785).

Selain itu cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat pula dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika :

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :



Gambar 4.45

Grafik Uji Heterokedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh.

4.2.2.1 Hubungan Peran Komite Audit Dan Kinerja Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* Di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Peran Komite Audit (X_1) dan Kinerja Audit Internal (X_2) dengan *Good Corporate Governance* (Y) maka dapat dicari dengan menggunakan analisis korelasi *pearson* (*product*). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu Interval.

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (peran komite audit dan kinerja audit internal) dengan Good Corporate Governance Di Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung Melalui korelasi parsial akan dicari besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kredit yang diberikan ketika variabel independen lainnya dianggap konstan. Berikut hasil uji parsial menurut *SPSS 15 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.47
Koefisien Korelasi Parsial peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.481
		Significance (2-tailed)	.	.004
		df	0	32
	X1	Correlation	.481	1.000
		Significance (2-tailed)	.004	.
		df	32	0

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika kinerja audit internal tidak berubah adalah sebesar 0,481 dengan arah positif. Artinya hubungan antara Hubungan antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* cukup kuat ketika kinerja audit internal tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika peran komite audit meningkat, sementara kinerja audit internal tidak berubah

maka akan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Asia Afrika No.49 Bandung. Kemudian besar pengaruh komite audit terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* pada pada kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung ketika kinerja audit internal tetap adalah $(0,481)^2 \times 100\% = 23,1\%$. Yang artinya pengaruh peran komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebesar 23,1%.

a. Korelasi kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika peran komite audit internal tidak berubah

Koefisien korelasi antara kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika peran komite audit tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dankualitas pelayanan dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui, dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melaluisecara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows*.

b. Korelasi kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika peran komite audit internal tidak berubah

Koefisien korelasi antara kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika peran komite audit tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.48
Koefisien Korelasi Parsial kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.475
		Significance (2-tailed)	.	.005
		df	0	32
	X2	Correlation	.475	1.000
		Significance (2-tailed)	.005	.
		df	32	0

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ketika peran komite audit tidak berubah adalah sebesar 0,475 dengan arah negatif. Artinya hubungan antara kinerja audit internal dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* cukup kuat ketika peran komite audit tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika kinerja audit internal meningkat, sementara peran komite audit tidak berubah pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Jln, Asia Afrika No 49 Bandung akan meningkat. Kemudian besar pengaruh independensi auditor eksternal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* ketika kompetensi auditor internal tetap adalah $(0,475)^2 \times 100\% = 22,5\%$. Yang artinya pengaruh kinerja audit internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* sebesar 22,5%

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, peran komite audit memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* dibanding kinerja audit internal.

Korelasi pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak Apabila kualitas pelayanan dianggap Konstan

C.Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh simultan variabel peran komite audit dan kinerja audit internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 4.49

Koefisien Determinasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682(a)	.465	.432	.40783

a Predictors: (Constant), x2, x1
b Dependent Variable: y
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Nilai R (0,682) pada tabel 4.49 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (peran komite audit dan kinerja audit internal) secara simultan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (peran komite audit dan kinerja audit internal) memiliki hubungan yang kuat dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace*.

Sementara nilai R-Square sebesar 0,465 atau 46,5 persen menunjukkan bahwa pada PT Pos Indonesia (Persero) Jln Asia Afrika No. 49 Bandung, variabel peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kualitas jasa audit sebesar 46,5 persen. Dengan kata lain peran komite audit dan kinerja audit internal secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 46,5% terhadap perubahan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace*. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 53,5%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel peran komite audit dan kinerja audit internal seperti manajemen audit internal, manajer perusahaan, dan pihak-pihak lain.

4.2.2.2 Peran Komite Audit Dan Kinerja Audit Internal Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace* Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Untuk menjawab permasalahan Peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung dilakukan pengujian koefisien regresi secara bersama menggunakan Uji F .Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ho : Semua $\beta i = 0$ $i = 1,2$	Peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
Ha : Ada $\beta i \neq 0$ $i = 1,2$	Peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

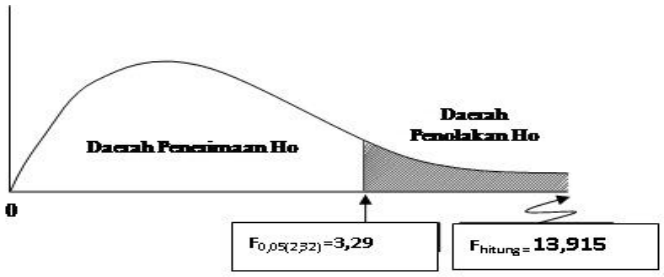
Tabel 4.50
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.629	2	2.314	13.915	.000(a)
	Residual	5.322	32	.166		
	Total	9.951	34			

a Predictors: (Constant), X2, X1
b Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} dari hasil pengolahan data sebesar 13,915 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2,32) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,29 Karena F_{hitung} (13,915) lebih besar dari F_{tabel} (3,29) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.



Gambar 4.1

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa Fhitung jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

- **Pengaruh peran Kinerja audite internal Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace***

Untuk melihat peran komite terhadap *Good Corporate Governace*, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kinerja Audit Internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governace* pada PT Pos (Persero) Bandung.

Kinerja Audit Internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governace* pada PT Pos (Persero) Bandung.

Perhitungan secara komputisasi dengan SPSS 15 yaitu sebagai berikut:

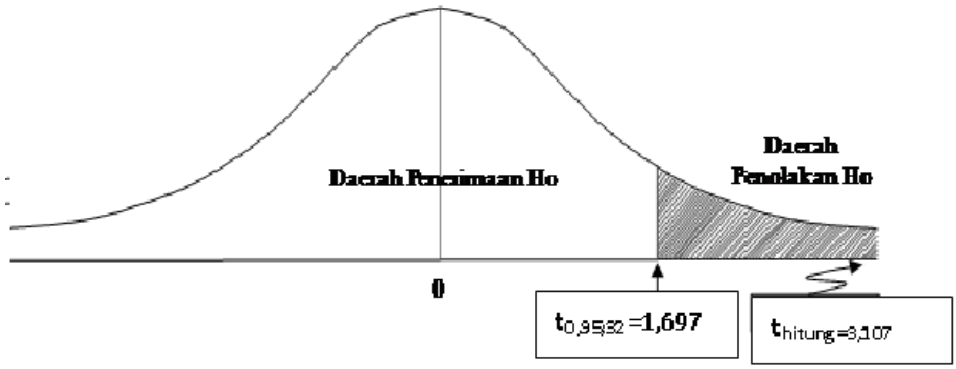
Tabel 4.51
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.373	.467		.799	.430
	X1	.468	.151	.424	3.107	.004
	X2	.415	.136	.417	3.055	.005

a Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

- Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.35 diperoleh nilai t_{hitung} variabel peran komite audit sebesar 3,107. Karena nilai t_{hitung} (3,107) lebih besar dari t_{tabel} (1,697) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas jasa audit. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa peran komite audit yang tinggi akan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) No 49 Bandung.



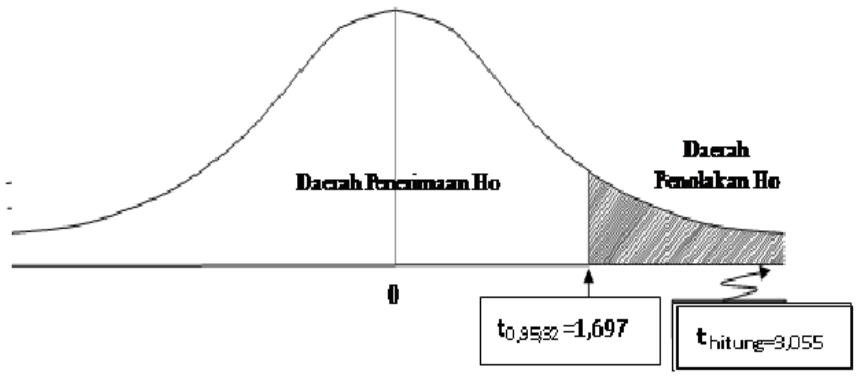
Gambar 4.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

- **Pengaruh kinerja audit internal Terhadap Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace***
  - Diduga kineja audit internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian satu pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_2 \leq 0$: Kinerja audit internal (X) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* (Y) pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

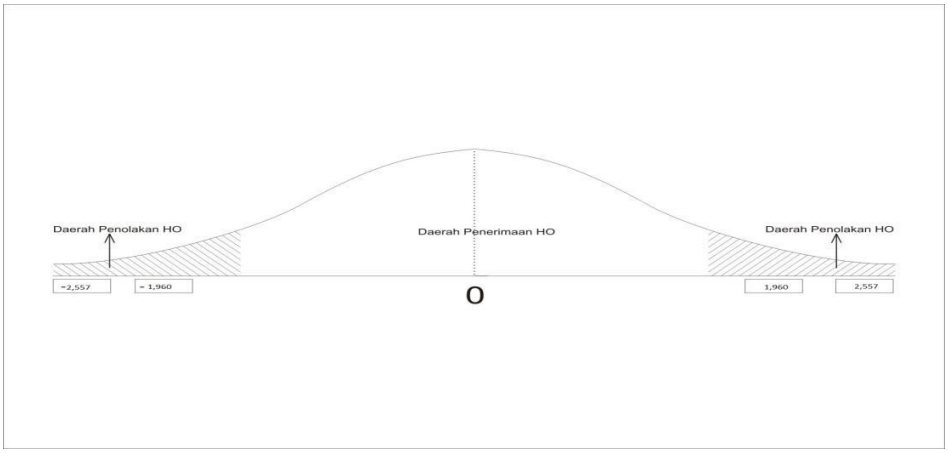
Ha.$\beta_2 > 0$: Kinerja audit internal (X) berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* (Y) pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

- Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.35 diperoleh nilai t_{hitung} variabel kinerja audit internal sebesar 3,055. Karena nilai t_{hitung} (3,055) lebih besar dari t_{tabel} (1,697) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kinerja audit internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace*. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa auditor internal yang makin independen akan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa kinerja audit internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.



Gambar 4.6

Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

(Kinerja Audit Internal)

Kesimpulannya, bahwa secara simultan maupun parsial kualitas Peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.Pengaruh yang bersifat positif atau searah menerangkan bahwa Peran komite audit dan kinerja audit internal secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 15 for windows.*, hasilnya adalah peran komite audit dan kinerja audit internal serta *good corporate governace* , serta adanya pengaruh yang kuat dan signifikan antara peran komite audit dan kinerja audit internal serta *good corporate governace* dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran komite audit dan kinerja audit internal pada PT Pos Indonesia (Persero) telah berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governace* juga baik.